



Persepsi Pemuda Terhadap Pelaku *Civic Virtue* di Desa Bangsalan

Puma Farah Dhiba ^{a, 1*}, Nurhadji Nugraha ^{b, 2}, Indriyana Dwi Mustikarini ^{c, 3}

^{abc} Universitas PGRI Madiun, Indonesia

¹ farahdhiba46@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 15 November 2020

Revised: 18 Desember 2020

Accepted: 1 Januari 2021

Kata-kata kunci:

Civic Virtue;
Persepsi Pemuda;
Perilaku Sosial.

Keywords:

Civic Virtue;
Youth Perception;
Social Behavior.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai macam persepsi pemuda terhadap *civic virtue* di Desa Bangsalan. Hal ini karena situasi saat ini sebagian masyarakat sudah tidak lagi mengindahkan kebajikan sebagai warga negara. Kepentingan umum tidak lagi menjadi hal penting, tetapi kepentingan pribadi yang lebih diutamakan. Situasi yang terjadi mengarah pada kemerosotan moral itu. Hal ini memicu berbagai persepsi mengenai *civic virtue* atau kebajikan warga negara, terutama yang terjadi pada pemuda di Desa Bangsalan dengan adanya pelaku *civic virtue* yang memiliki persepsi negatif maupun positif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pemuda di Desa Bangsalan terhadap *civic virtue*, didominasi dengan persepsi positif. Faktor yang menyebabkan persepsi tersebut adalah perubahan positif yang dilakukan oleh pemuda Desa Bangsalan. Adanya perubahan perilaku sosial pemuda Desa Bangsalan yang semakin baik, dan semakin eratnya keorganisasian Karang Taruna di Desa Bangsalan.

ABSTRACT

The Youth Perception of Civic Virtue Actors in Bangsalan Village. The aim of this research is to find out the various perceptions of youth towards civic virtue in Bangsalan Village. This is because the current situation some people do not notice the virtues of being citizens. The public interest is no longer important, but personal interests take precedence. The situation led to that moral degradation. This triggers various perceptions about civic virtue, especially those that occur in youth in Bangsalan Village with the actors who have negative or positive perceptions. This type of research is descriptive with qualitative approach. By using observation data collection techniques, interviews, and documentation. This research was conducted in Bangsalan Village, Sambit District, Ponorogo Regency. The results showed that the perception of youth in Bangsalan Village towards civic virtue, dominated by positive perceptions. The factor that causes the perception is the positive changes made by the youth of Bangsalan Village. There is a change in the social behavior of Bangsalan village youth who are getting better, and getting closer the Karang Taruna in Bangsalan Village.

Copyright © 2021 (Puma Farah Dhiba dkk). All Right Reserved

How to Cite : Dhiba, P. F., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. (2021). Persepsi Pemuda Terhadap Pelaku Civic Virtue di Desa Bangsalan. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(1), 16–20. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/25>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis. Sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara, yang berarti semuanya dimulai dari rakyat dan kembali lagi untuk rakyat. Dikatakan bahwa Indonesia berpotensi besar dijadikan rujukan demokrasi di kawasan Asia, hal itu dikarenakan berhasilnya Indonesia dalam mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut ketua Asosiasi Konsultasi Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, Indonesia berhasil dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang sampai saat ini di antaranya masih diperintah oleh “tangan besi”. Indonesia juga bisa dijadikan contoh, bahwa sistem demokrasi yang dibangun dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi (Nihaya, 2011).

Kemajuan Indonesia sebagai Negara yang demokratis, berdasarkan dengan adanya makna dari sila-sila Pancasila, terlebih terhadap sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal itu membuktikan bahwa terlaksananya sebuah negara yang demokratis dalam berbagai sisi kehidupan bermasyarakat. Negara Indonesia bisa menjalankan sistem demokrasi dalam bidang politik, hubungan ekonomi, ataupun penyelenggaraan kebudayaan dan sosial dalam bernegara. Demokrasi didasarkan dengan kedaulatan rakyat, terwujudnya kemufakatan dalam pengambilan keputusan, menghargai pendapat yang ada, serta bertanggung jawab atas peran yang diberikan kepada setiap warga negara maupun pemerintah (Gultom, & Reresi, 2020).

Negara Indonesia menganut asas demokrasi, penting bagi warga Indonesia untuk memiliki sebuah proses untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Proses tersebut kita kenal sebagai Pemilu atau pemilihan umum. Pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu Negara (Vita, 2019). Dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Selain itu, kewajiban dan hak warga Negara yang harus seimbang dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan setiap warga negara harus memiliki *civic virtue* atau kebajikan warga Negara. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam Undang-Undang.

Namun bangsa Indonesia saat ini sebagian masyarakatnya sudah tidak lagi mengindahkan kebajikan sebagai warga negara. Kepentingan umum memang sudah bukan lagi menjadi prioritas, tetapi lebih kepada urusan atau kepentingan pribadi yang diutamakan. Sifat jujur, berani, adil, dan benar sudah hilang dan tak lagi ada, karena tertutup oleh perlakuan-perlakuan buruk yang ringan maupun berat, yang disinggahi oleh kurangnya moral, tak hanya dari kalangan dewasa saja, namun saat ini sudah sampai kepada bibit-bibit pemuda yang menjadi harapan bangsa, yang akan membela nama baik bangsa dan negara.

Pendidikan karakter melalui pendidikan kewargaegaraan merupakan salah satu hal yang penting. Hal ini bisa kita lihat dari permasalahan saat ini. Para pemuda Indonesia terlebih di kota-kota besar bahkan sudah bergerak secara leluasa ke daerah pedesaan. Sebagian pemuda menjadi apatis, cuek dan kurang peduli terhadap perubahan lingkungan. Kesibukan mereka saat berada di luar lingkungannya membuat mereka menjadi malas untuk beradaptasi. Hal seperti ini memicu berbagai persepsi mengenai *civic virtue* atau kebajikan warga negara. Di sini, urgensi *civic virtue* dipertanyakan. Berbagai persepsi pro dan kontra mengenai kewajiban para pemuda untuk menerapkan *civic virtue* pada kehidupan bermasyarakat memang harus diuraikan, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap *civic virtue*.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2020 telah dijumpai beberapa

kejadian yang membuktikan bahwa masih ada pemuda di desa Bangsalan yang belum mengerti apa arti dari *civic virtue* itu. Sebagian pemuda desa Bangsalan masih merasa bahwa pendidikan kewarganegaraan yang didapat di sekolah memang sulit untuk dijalankan dalam lingkungan bermasyarakat. Namun juga beberapa pemuda berpendapat bahwa *civic virtue* sudah seharusnya dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun kebijakan masyarakat atau *civic virtue* itu harus sepenuhnya didasarkan pada kesadaran diri sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, persepsi yang timbul di masyarakat terlebih di kalangan pemuda, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai persepsi pemuda dengan adanya pelaku *civic virtue*. Dengan adanya situasi tersebut, penulis memilih judul “Persepsi Pemuda Terhadap Pelaku *Civic Virtue* di Desa Bangsalan”.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan pada obyek yang alamiah untuk menghasilkan temuan baru (Sugiyono, 2016; Nur Ardita, 2017). Waktu penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yang dimulai dari bulan Maret hingga Juli 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pada penelitian ini penulis melakukan pengambilan data dengan cara wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bangsalan yang merupakan pemuda karang taruna, ketua karang taruna, tokoh masyarakat, dan kepala desa. Penelitian melalui beberapa tahapan yaitu: pra-lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga cara, yaitu: reduksi data; penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh hasil penelitian mengenai Persepsi Pemuda terhadap pelaku *civic virtue* di Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 yaitu: persepsi masyarakat tentang *civic virtue* di Desa Bangsalan sudah sesuai dengan realitas yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat terhadap *civic virtue* itu sendiri. Tidak banyak perbedaan persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat terhadap *civic virtue*. Masyarakat menilai bahwa *civic virtue* memang sudah seharusnya ditanamkan di dalam identitas diri para warga negara (Gultom, Munir, Ariani, 2019). Hal ini karena *civic virtue* juga membuat warga negara menjadi sadar akan pentingnya mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi tanpa mengenal pamrih. Seperti yang disampaikan narasumber yakni saudara RJ yang mengatakan bahwa *civic virtue* itu ketika seseorang menjadi kooperatif dengan keadaan sekitarnya, yang menjadikan pemuda mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

Banyak persepsi masyarakat yang menghasilkan citra positif akan *civic virtue*. *Civic virtue* memang salah satu pembentuk perilaku sosial warga negara. Yang bisa merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik. Seperti yang diungkapkan seorang narasumber dengan inisial TNDR bahwa *civic virtue* mampu merubah pemuda desa Bangsalan mau untuk berdiskusi tentang kepentingan masyarakat, dan melaksanakan kepentingan bersama demi memajukan masyarakat desa Bangsalan. Sedangkan hanya sedikit sisi negatif terhadap *civic virtue* yang mengarah pada persepsi masyarakat seperti yang dikemukakan seorang narasumber yaitu MT bahwa sisi negatif *civic virtue* hanya sedikit saja seperti adanya rasa iri sesama pemuda terhadap keaktifan pemuda lain dalam melaksanakan *civic virtue*. Namun, dalam keseluruhan persepsi masyarakat berisi persepsi yang positif terhadap *civic virtue*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pemuda terhadap *civic virtue* menurut masyarakat tidak jauh beda satu sama lain. Faktor internal dan eksternal sudah mutlak adanya terhadap *civic virtue*. Seperti pendapat ibu TNDR selaku kepala desa, untuk melakukan *civic virtue*, muncul dorongan hati, kebiasaan berkumpul dengan masyarakat, faktor lingkungan, ajakan sebayanya. Hal itu yang menjadi

faktor pendorong untuk melaksanakan *civic virtue*. Secara tidak langsung dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi *civic virtue* berperan terhadap perubahan perilaku sosial pemuda desa Bangsalan seperti yang di sampaikan MM selaku ketua Karang Taruna menurutnya di dalam Karang Taruna para anggotanya menjadi lebih bisa menerima pendapat orang lain, menjadi lebih saling mendukung kelebihan maupun kekurangan anggotanya dalam pelaksanaan *civic virtue*.

Hal itu menunjukkan bahwa *civic virtue* memiliki peran penting dalam perubahan perilaku sosial pemuda desa Bangsalan. Kegiatan-kegiatan pemuda desa Bangsalan juga menunjukkan bahwa *civic virtue* berhubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Visi misi desa Bangsalan memiliki keterkaitan yaitu dengan tujuan untuk mewujudkan kerjasama yang harmonis antara aparat pemerintahan desa, organisasi, kelompok-kelompok tertentu dengan masyarakat. Namun, juga di dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang kebanyakan muncul dari dalam diri individu seperti yang di ungkapkan NA sebagai pemuda yang tidak mengikuti kegiatan karang taruna mengungkapkan bahwa hambatan dalam penerapan *civic virtue* berada pada kurangnya pengalaman dalam berorganisasi dan berkumpul dengan masyarakat.

Pembahasan tentang dapat diperoleh hasil penelitian mengenai Persepsi Pemuda terhadap pelaku *civic virtue* di Desa Bangsalan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, yang didasarkan pada temuan teori dan hasil temuan data dari penelitian: pelaksanaan *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan tidak terlepas dari berbagai persepsi yang ada di masyarakat terlebih di kalangan pemuda. Sejalan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pasal 3 yang berbunyi “PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Peraturan tersebut sesuai dengan kondisi kehidupan pemuda pada saat ini. Pendaapat ini sesuai dengan contoh kebajikan masyarakat yaitu tentang komitmen dedikasi terhadap hak asasi manusia, kebaikan bersama, persamaan, dan peraturan hukum (Quigley, 2000).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Penulis di Desa Bangsalan, ditemukan persepsi pemuda tentang *civic virtue*. Pertama mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap *civic virtue*, masyarakat mengatakan bahwa *civic virtue* adalah kemauan warga Negara yang muncul dari dalam dirinya untuk melakukan interaksi, kerjasama, dengan masyarakat dengan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Para pemuda juga memahami bahwa dengan melakukan *civic virtue* dengan baik akan menjadikan kehidupan dalam bermasyarakat menjadi lebih mudah, sehingga memudahkan mereka untuk berinteraksi dengan warga dan lingkungannya. Di sinilah, ada pembentukan karakter bagi warga (Gultom, 2019). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Quigley dalam Udin S. Winatapura dan Dasim Budimansyah (2007), “yakni kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi”

Dari pemahaman masyarakat di atas terhadap *civic virtue* lantas muncul berbagai macam persepsi tentang *civic virtue*. Dari hasil analisis data, di kemukakan bahwa masyarakat berpersepsi baik terhadap *civic virtue* yaitu, bahwa dengan adanya *civic virtue* mengubah pola pikir pemuda menjadi lebih baik, aktif, dan mau menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, tidak membeda-bedakan antara sesamanya, bisa memposisikan dan menempatkan diri sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, tidak menjadikan diri egois serta bisa menjadikan organisasinya lebih kompak, tidak meminta pamrih pada setiap pelaksanaan yang menyangkut kepentingan bersama sehingga di dalam pelaksanaannya bisa fokus terhadap tujuan utamanya. Selain itu hal ini sama dengan Fokus utama *civic virtue* yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi juga diperkuat oleh pemikiran Nicollo Machiavelli, seorang filsuf sekaligus tokoh politik yang turut mewariskan konsep dan teori mengenai *civic virtue*. Machiavelli mengatakan bahwa negara yang baik adalah negara bila warga negaranya terlibat aktif dari sudut pandang atau pandangan politik dan memahami bahwa

satu-satunya cara untuk memiliki dan menjadi negara yang otentik adalah Negara yang bisa menempatkan kebaikan bersama di atas semua kepentingan pribadi Matei (dalam Syifa,2019)

Dengan adanya berbagai pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap *civic virtue* maka muncul faktor-faktor yang mempengaruhi pemuda desa Bangsalan untuk melaksanakan *civic virtue*. Banyak persepsi dari pemuda dan tokoh penting masyarakat yang memberikan ungkapan tentang faktor yang mempengaruhi pemuda desa Bangsalan melaksanakan *civic virtue*, seperti adanya dorongan dari dalam diri masing-masing pemuda untuk melaksanakan *civic virtue*, tanpa adanya paksaan dari orang lain tergugahnya diri dalam melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk sosial, memposisikan dirinya sebagaimanamestinya sehingga mau melaksanakan *civic virtue* di lingkungan masyarakat maupun di organisasinya berdasarkan suasana hati pemuda untuk melaksanakan *civic virtue*, karena dengan suasana hati dan kemauan atau kesadaran diri yang baik akan berpengaruh terhadap pelaksanaan *civic virtue*.

Selain itu karena faktor kebiasaan berkumpul dengan masyarakat sekitar, berbaur dan bersosialisasi dengan banyak orang, dengan orang yang lebih tua sehingga mendapatkan pengalaman untuk melaksanakan *civic virtue*. Faktor dari sesama anggota organisasi yang diikuti seperti adanya dorongan dari teman sebaya untuk ikut dalam pelaksanaan *civic virtue* itu sendiri. *Civic virtue* terlaksana juga karena adanya kegiatan mendukung yang dilakukan oleh para pemuda. Hal ini sejalan dengan pernyataan Padsakoff et.al (dalam A Mahmudah,2013) menyebutkan ada empat faktor yang mendorong munculnya perilaku kewarganegaraan dalam diri seseorang yaitu: karakteristik individual yang meliputi persepsi keadilan, kepuasan kerja, komitmen organisasional dan persepsi dukungan pimpinan, karakteristik tugas meliputi kejelasan atau ambiguitas peran, karakteristik organisasional meliputi struktur organisasi, dan model kepemimpinan, serta perilaku pemimpin.

Selanjutnya mengenai peranan dari *civic virtue* terhadap perubahan perilaku sosial pemuda yaitu diketahui bisa merubah pola pikir pemuda menjadi lebih baik, membuat pemuda menjadi lebih bisa bersosialisasi dan berpendapat, serta mendahulukan kepentingan bersama. Selain itu juga membuat keharmonisan antar tetangga dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan tentang manfaat etika dalam bermasyarakat, akan lebih dihargai oleh tetangga dalam hidup bermasyarakat, etika tentu akan membawa masyarakat lebih mawas diri dalam bertindak, berbuat, kehidupan bermasyarakat akan lebih hangat dan harmonis, terhindar dari konflik yang berat, sehingga tercipta kerukunan dan rasa saling membantu, munculnya empati kepada sesama, timbulnya rasa gotong-royong, timbul sifat keorganisasian yang bermanfaat (Feggyernes, 2019).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi pemuda terhadap pelaku *civic virtue* di Desa Bangsalan, maka dapat disimpulkan bahwa pemuda dapat membeberkan dan memberikan makna terhadap kehadiran *civic virtue* dalam kehidupan sehari-harinya melalui berbagai proses dan pengalaman diri sendiri. Implikasinya bisa memunculkan pikiran atau informasi yang sesuai dengan apa yang mereka lihat dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda desa Bangsalan memiliki persepsi bahwa *civic virtue* membuat pemuda menjadi lebih aktif dalam berkegiatan di masyarakat, bersosialisasi, mengubah pola pikir menjadi lebih baik, serta mau mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi *civic virtue* yaitu, pertama, muncul kesadaran diri sendiri untuk melaksanakannya, berdasarkan suasana hati masing-masing pemuda. Kedua, kebiasaan dan pengalaman di dalam berorganisasi, berkumpul dengan masyarakat dan bersosialisasi dengan sesama. Ketiga, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh para pemuda itu sendiri sehingga memicu pelaksanaan *civic virtue*. Peran *civic virtue* terhadap perubahan perilaku sosial pemuda bisa merubah pola pikir pemuda menjadi lebih baik, membuat pemuda menjadi lebih bisa bersosialisasi dan berpendapat, mendahulukan kepentingan bersama, dan menjaga keharmonisan antar tetangga dan masyarakat.

Referensi

- Definisi Persepsi serta Pengertian menurut para Ahli. Diakses pada 20 April 2020 <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html>
- Elok Faiqotul Hikmah. (2013). Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Remaja Hamil di luar Nikah. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. http://etheses.uin-malang.ac.id/1838/5/09410034_Bab_2.pdf
- Goh, X. Joanes J. Ahmad Soffian. Goh Kadir S. (2014). Persepsi & Logik. University Teknologi Malaysia. https://www.academia.edu/23620455/Persepsi_and_Logik
- Good News From Indonesia (06 september 2018). <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/09/06/sejarah-pemilu-di-indonesia>
- Gultom, A. F. (2019). Konsumtivismen Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse. Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter, 2(1), 17-30. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2018.002.01.2>
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 4(2), 55-61. <https://doi.org/10.21067/jmk.v4i2.4087>
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga Negara Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 9(2), 77-84. <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i2.8052>
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada R UU Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 38-47. <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497>
- H.Nihaya M (2011) Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. Sulesana volume 6 Nomor 2 Tahun 2011
- Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>
- <https://muchad.com/pengertian-pemuda-dan-macam-macamnya/>. Diakses pada tanggal 20 April 2020.
- Jajang Gumilang, (2017). (Persepsi Remaja Di Lingkungan Lokalisasi Tentang Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti (Studi Kasus Remaja Di Lingkungan Lokalisasi Gambilangu Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal). Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo.
- Kompas.com (2017) Pemuda Sebagai Generasi Pelopor Berbangsa Dan Bernegara. Diakses 20 April 2020. <https://www.kompasiana.com/edutripkewarganegaraanksw/594b376f54610c63551112b2/pemuda-sebagai-generasi-pelopor-kesadaran-berbangsa-dan-bernegara>
- Nur Ardita Rahmawati. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Museum Misi Muntilan Sebagai Sarana Pendidikan Karakter. Skripsi. Yogyakarta: Prodi Pendidikan Sejarah. Universitas Sanata Dharma
- Palila, S. (2018). Kebermaknaan Hidup Individu Yang Pernah Mengalami Kekerasan Pada Masa Anak (Child Abuse). Jurnal Psikologi Integratif, 5(1), 19-31.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pasal 3
- Sari, N. W., & Hanum, F. (2017). Peran Kultur Sekolah Dalam Membangun Prestasi Siswa Di MAN 1 Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Sosiologi.
- Slide Share. 2019. Pancasila Sebagai Sistem Moral dan Etika Bermasyarakat (Civic virtue) diakses pada 29 juni 2020 <https://www.slideshare.net/feggyernes/pancasila-sebagai-sistem-moral-dan-etika-bermasyarakat-civic-virtue>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian (cetakan kelima belas). Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Syifa Syarif (2019) Konsep Civic virtue Machiavelli Dan Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/333395809_Konsep_Civic_Virtue_dan_Pendidikan_Kewarganegaraan_di_Indonesia
-